

DEMOKRASI POLITIK SAMPAI WARISAN RADIKALISME; SEBUAH PENGETAHUAN NASIONALISME ERA MILENIAL

Fajar

Dosen Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar
Email ; gerhana69matahari@gmail.com

Abstract

State and its function are conducted by institution mediated by contesting political parties within democratic events called 'public election.' This contestation works as public space where power is identified as electoral ceremony regulated through laws of election. Power is assigned by public power to the lawmaker or legislative power. This style of government has then been in line with regulated laws, not to accommodate the rich, nor to the poor, but applies for the sake of the whole. In an independent situation, political equality is critical. A medieval formula of independence states that *salus populi suprema lex* (people welfare is the grandiose law). In preserving such principal rights, unfair treatment between the rich and the poor frequently occurs, which within some circumstance, leads to radical movement by certain group of insurgents. This typical group resists against the ruling government and complaining about the former's lack of access towards their principal rights of property, by which they believe that all conditions to guarantee the welfare of the people should be proportionally and equally available.

Keywords:

Democracy, Legislative, Radicalism

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kata Kolektifisme mengandung serapan seperti kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan lain-lain. Kata tersebut menjadi trend positif dalam kehidupan masyarakat kita, katakanlah menyebut kolektifisme berarti sebuah paham karena akhiran isme dibelakang kata kolektif. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat kita sepertinya lebih mudah menyebutnya sebagai kata gotong royong ataukah kebersamaan, semua dalam perspektif yang positif.

Mengambil perbandingan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kolektifisme merupakan ajaran atau paham yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan, baik atas modal, tanah, maupun alat produksi (semua harus dijadikan milik

bersama, kecuali barang konsumsi)¹. Jika memperhatikan makna dari kolektivisme KBBI, terkesan maknanya sangat materialisme dimana makna tersebut seolah terbatas pada materi yang diperebutkan, materi yang dijadikan sebuah kebersamaan, materi yang membuat semua orang berkumpul kedalam arena produksi untuk menghasilkan sesuatu, memperebutkan sesuatu atau bahkan menjadi suatu cita cita bersama.

Pandangan material tersebut juga dianut oleh Marxis mengenai kepentingan material, tidaklah independen atau terisolasi melainkan adanya kepentingan dari orang yang satu tidak memiliki hubungan dengan kepentingan orang lain dan bahkan bisa membuat individu yang satu bermusuhan dengan individu yang lain². Semakin seseorang individu sadar bahwa ia memiliki kesamaan kondisi dan kesamaan tujuan dengan orang lain, maka semakin luas pandangan mereka terhadap kepentingan material mereka sehingga kepentingan individu berubah menjadi kepentingan kelas³.

Kepentingan material atau kepentingan ekonomi seperti ini dalam tinjauan Marxis dapat memainkan peran secara langsung ketika individu-individu yang berada dalam masyarakat yang memahami bahwa mereka mempunyai kesamaan kepentingan dengan individu lainnya sehingga memungkinkan untuk melakukan pengorganisasian kepentingan mereka itu dan mengatasi kesulitan kesulitan yang dapat menghambat tindakan kolektif. Dalam hal ini tindakan kolektif yang dimaksud merupakan asas dari lahirnya sebuah perasaan ingin bersama untuk mengelola sesuatu yang sifatnya menguntungkan satu sama lain. Analisis kolektifitas juga menjadi suatu tindakan yang berdasar pada kepentingan individu yang akhirnya menjadi suatu kepentingan kelas, apakah kepentingan pribadi dari seorang individu sampai dengan benturan kepentingan dengan individu lainnya di dalam sebuah produksi sosial.

Dalam masyarakat sipil kita, produksi sosial biasanya terbangun berdasarkan aspek kebersamaan terhadap kebutuhan individu. Katakanlah kebutuhan individu terhadap pentingnya nilai nilai budaya sampai kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik, kebutuhan

¹KBBI

²James A Caporaso dan David P.Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), h. 127.

³James A Caporaso dan David P.Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, h. 128

akan kesamaan derajat dan lain sebagainya. Hal ini merupakan suatu kepentingan kelas sipil yang akan menjadi produksi sosial yang akan diperhatikan oleh kekuasaan negara sebagai pilar yang utama.

Dalam islam juga ada istilah *Thabaqah* (kelas) menurut Ali Syariati *Thabaqah* itu adalah merupakan sekumpulan manusia yang memiliki langgam hidup, institusi, profesi dan penghasilan yang sama dan setingkat. Orang-orang tersebut kemudian membentuk elite atau kelas tertentu. Individu individu yang menempati lapisan yang sama, mempunyai kesamaan dalam corak kerja dan kehidupan, lalu menguasai kendali sosial dan sumber sumber kekayaan⁴. Berdasarkan penafsiran Ali Syariati tersebut bahwa sekelompok orang orang membentuk kelas tertentu, kata “membentuk” disini adalah sebuah tindakan kolektifitas dari sekelompok orang yang mempunyai kesamaan profesi dan langgam hidup. Seseorang dalam wajah milenial saat ini akan bersama sama jika seseorang ataupun individu tersebut mempunyai kesamaan terhadap sesuatu sehingga memungkinkan terbentuknya sebuah institusi berupa komunitas, apakah komunitas profesi, komunitas adat sampai komunitas pergerakan yang memungkinkan didalamnya terjadi sebuah aktifitas aktifitas bersama dengan individu lainnya.

Gotong Royong Sebuah Kekuatan Tunggal

Dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Pancasila, salah satu paragraph pidatonya menjelaskan tentang gotong royong “Gotong Royong” adalah dasar dari Pancasila, penggalan pidatonya yaitu *“mendirikan negara Indonesia harus didukung oleh semua. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, Bukan Van Eck Buat Indonesia, Bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, Semua Buat Semua. jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia tulen yaitu perkataan gotong royong, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong, alangkah hebatnya negara gotong royong. Prinsip gotong royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara*

⁴ Syarifuddin Jurdi, *Negara dan Kekuasaan Pemikiran Politik Ali Syariati*, (Cet. I; Yogyakarta: PT Gramasurya dan Labpol UINAM, 2016), h.122.

*yang islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia*⁵.

Jika melihat konteks makna pidato Soekarno diatas, gotong royong tidak terbatas pada kata kerja biasa ataupun seperti dianggap sebagai tindakan kolektif biasa namun bisa berarti sebuah nasionalisme luar biasa untuk membangun sebuah keadaan bangsa dan negara menjadi sebuah kekuatan yang tunggal. Pancasila yang berjumlah lima sila jika digabung menjadi satu adalah bermakna sebagai kekuatan Gotong Royong. Makna yang begitu dalam yang disampaikan dihari yang ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila merupakan momentum kekuatan tunggal bangsa Indonesia yang berada dalam semangat semua untuk semua. Kekuatan tunggal yang dimaksudkan disini adalah sebuah anggapan serius dari seorang Soekarno ingin menyatukan semua yang ada di Indonesia saat itu, mulai dari keturunan sehingga beliau menyebut nama keturunan Belanda seperti Van Eck atau Pribumi dengan nama Nitisemito. Atau bahkan menyebut agama yang bisa hidup berdampingan dengan agama lain.

Gotong Royong dalam hal ini bermakna universal, akan tetapi kekuatannya adalah Tunggal. Yang Tunggal itu ketika lima sila dalam pancasila digabung menjadi satu itulah Eka Sila yang bermakna sebagai Gotong Royong. Memberikan tafsiran gotong royong terhadap maksud Soekarno bisa menjadi bahkan sangat filosofis, dalam pandangan publik gotong royong sangat biasa diartikan sebagai kerja sama, kerja bakti, kerja membersihkan lingkungan, bahkan dengan sangat filosofis Soekarno menyebut Gotong Royong adalah sebuah Karya. Karya dimana yang dihasilkan bisa jadi adalah sebuah pengabdian yang menyeluruh kepada bangsa dan tanah air maupun inovasi terkini yang bisa digunakan untuk bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia.

Kekuatan tunggal gotong royong ini menjadi sebuah hakikat jika lima sila dalam pancasila adalah sebuah kebenaran tunggal yang bersumber dari Allah swt. Gotong royong adalah sebuah sikap nasionalisme yang hidup dalam peri kemanusiaan untuk permufakatan, untuk keadilan sosial, untuk keTuhanan. Dalam makna tersebut arti gotong royong lebih

⁵ Pidato Bung Karno 1 Juni 1945

kepada sebuah kehidupan yang hidup, yaitu *perjuangan yang berjalan terus menerus dan bersama sama*.

Demokrasi Politik

Negara dan fungsinya dilaksanakan oleh kelembagaan dengan perantara partai politik yang berkontestasi dalam perhelatan demokrasi yang sering kita kenal dengan namanya pemilihan umum. Setidaknya kontestasi tersebut merupakan wadah kerakyatan dimana kekuasaan didefinisikan sebagai sebuah pesta pemilihan yang diatur lewat undang undang pemilihan.

Kekuasaan diserahkan oleh rakyat kepada pembuat undang undang atau legislative. Oleh karena itu cara memerintah harus sesuai dengan undang undang yang sudah ditetapkan, bukan satu undang undang untuk si kaya dan undang undang lain untuk si miskin, tetapi undang undang ditetapkan untuk kebaikan bersama. Didalam kemerdekaan persamaan politik adalah penting. Rumus abad pertengahan untuk kemerdekaan ialah *Salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi)⁶.

Alasan mengapa orang orang bergabung diri kedalam masyarakat tak lain karena untuk menyelamatkan hak milik mereka, dan terakhir, mengaa mereka memilih dan menyerahkan kewenangan pada badan legislative karena di sana undang undang bisa dibuat sedang undang undang dimaksudkan sebagai pengawal dan benteng hak milik seluruh anggota masyarakat, serta membatasi kekuasaan dan melunakkan penguasaan dari setiap pihak atau anggota masyarakat lainnya. Sebab tidak selalu dapat diduga kalau badan legislative berniat untuk memusnahkan apa yang dirancang oleh tiap orang dengan masuk ke dalam masyarakat, dan untuk mana rakyat menyerahkan diri kepada badan pembuat undang undang ciptaan mereka sendiri, bilamana para pembuat undang undang itu berusaha menyingkirkan dan memusnahkan hak milik rakyat itu, atau menjadikan mereka budak di bawah kekuasaan yang sewenang wenang, berarti mereka sebenarnya dalam keadaan perang dengan rakyat, yang setelah itu akan bebas dari kepatuhan lebih lanjut⁷.

⁶ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta : Rajawali ; Yogyakarta : Yayasan Solidaritas Gajah Mada (Yasogama), [1985]) Hal.130

⁷ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, h. 132

Pada dasarnya jika analisis hak milik itu menjadi suatu keutamaan dalam masyarakat, tentu tidak semua masyarakat kita mempunyai hak milik yang berarti bagi kelangsungan kehidupan mereka, katakanlah tanah, rumah, kebun bahkan pertanian yang sejatinya harus mereka miliki masing masing, akan tetapi hak milik yang dimaksudkan bahkan sudah menjadi milik sebagian kecil orang bahkan menjadi pasar jual beli hak milik baik berupa perdagangan, persaingan, dan system pemerintahan telah bermain pada arena yang sama dan bergulir ditempat yang sama.

Jika demikian maka tujuan konstitusi dalam bernegara adalah stabilitas, dalam tesis Montesquieu adalah mensyaratkan campur tangan pemerintah atau negara dalam urusan warga negara hanya bilamana perlu saja. Pasar dilihat sebagai pengatur aktivitas ekonomi, sosial dan juga politik. Disini bahaya yang terbesar adalah konflik antar bangsa⁸. Begitu manusia bergabung ke dalam satu keadaan yang disebut bermasyarakat, ia langsung tidak lagi merasa lemah, dengan demikian, rasa persamaan pun hilang, yang bangkit kemudian hanyalah suasana permusuhan ataupun perang⁹. Karena apabila rasa permusuhan diantara bangsa mulai meningkat, maka ada saja masyarakat tertentu yang merasa dirinya kuat. Setiap individu, seperti juga di setiap masyarakat kian menjadi peka dengan kekuatannya, karena itu mereka berusaha menarik keuntungan pokok dari masyarakat itu untuk kepentingan sendiri, yang kemudian melahirkan pula suasana perang atau permusuhan antar individu.¹⁰

Dalam hal stabilitas bernegara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada distabilitas atau ketidak seimbangan dalam pengelolaan bernegara yang mengakibatkan permusuhan antar individu dikarenakan oleh aktivitas ekonomi, sosial dan politik di masyarakat kita berbeda beda. Kepentingannya adalah mereka dapat mengelola permusuhan atau distabilitas tersebut dengan melalui hubungan antara si penguasa dan dikuasai maupun melalui hukum politik ataupun hukum sipil yang mengatur antara individu dan individu lainnya.

Dalam masyarakat masyarakat di mana kebebasan menjadi institusi, artinya telah terlembagakan menjadi perilaku, menjadi kitab hukum, sistem politik, dan sebagainya,

⁸ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, h. 135

⁹ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, h.132

¹⁰ David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, h. 132

memang kelihatan mereka maju dengan cepat, atau menjadi negara-negara yang maju. Pasti ada hubungan mengapa “Barat” adalah juga negara negara yang paling kaya, paling kuat, sekaligus paling bebas. Pasti ada hubungan antara kebebasan, kesejahteraan, dan kemajuan sebuah bangsa. Itulah yang dikatakan oleh John Stuart Mill¹¹. Antara kebebasan, kesejahteraan sampai permusuhan adalah ciri demokrasi politik sedang berjalan di masyarakat, tak terkecuali jika sampai yang mengancam demokrasi pun juga demikian terjadi bahkan didepan mata sekalipun.

Warisan Radikal Islam Politik di Jaman Milenial

Pemahaman Jaman Milenial merupakan suatu kondisi kekinian yang berarti masyarakat dalam perilaku tumbuh beriringan dengan produksi teknologi yang berkembang seperti perangkat mobile, otomotif, media sosial, internet sampai pada industry persenjataan. Namun dalam hal ini milenial lebih banyak lekatkan sebagai teknologi dan perangkat internet sebagai pasar konsumsi popularitas. Dalam internetpun akad jual beli bisa terjadi kesepakatan dimana sampai sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk tertarik kepada sebuah barang atau jasa dimana terjadi sebuah kebebasan seseorang dalam melakukan interaksi.

Sifat tradisi radikal sangat berbeda dengan tradisi pencerahan yang memegang teguh kepercayaan terhadap rasionalitas dan mengangkatnya sebagai hal yang lebih diutamakan. Sasarannya juga sangat berbeda. Radikalisme mau mematahkan, bukan mendamaikan hubungan hubungan kelas yang sudah ada, prinsip prinsip peraturan, dan perilaku individu. Semakin radikal sebuah teori akan semakin besar pula tuntutananya itu terhadap keadaan hidupnya tetapi juga pada upaya peningkatan pengertian yang lebih baik terhadap situasi yang hidup disekitarnya. Kaum radikal yang paling militan percaya bahwa transisi semacam itu sukar untuk dicapai tetapi tindakan revolusioner bisa ditingkatkan

¹¹ Rizal Mallarangeng, *Dari Langit ; Kumpulan Esai Tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan* , (Cet. I; Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia), h. 13.

dengan “memaksa orang orang untuk bebas” baik mental maupun fisik¹². Orang bisa saja menjadi radikal tanpa harus menjadi revolusioner atau sebaliknya.

Memahami radikalisme saat ini memang butuh pendekatan holistik, karena instrument yang digunakan pun sudah pada tahap yang sangat cepat, intinya berada pada doctrinal seseorang kepada orang lainnya yang menggunakan instrument teknologi semacam internet dan teknologi daring yang semua orang bisa akses di jaman kekinian. Kita bersepakat bahwa tindakan radikalisme telah mewabah tidak hanya pada unsur masyarakat menengah, bahkan sudah pada tahap semua golongan maupun kelas sosial bahkan yang paling mengawatirkan adalah infiltrasi gerakan radikalisme mengarah pada komunitas komunitas agama.

Menurut Luthfi Assyaukani dalam buku *ideology islam dan utopia* berkata bahwa kecenderungan kaum Muslim Indonesia untuk menjadi moderat secara politis menarik diamati, khususnya bila kita membandingkan fakta ini dengan kecenderungan di negara lain dalam suasana kebangkitan Islam di tingkat global. Di negara negara Muslim lain, kebangkitan Islam seringkali ditandai dengan menguatnya puritanisme dan radikalisasi sikap sikap religious politik. Partai partai politik Islam di negeri negeri Muslim seperti Yordania, Aljazair, dan Turki, semuanya memperoleh kemenangan besar dalam Pemilu. Begitu juga, sentimen Islam di negara negara itu mendapatkan perhatian publik yang semakin besar. Keadaan ini sangat berbeda dengan fenomena kebangkitan Islam di Indonesia. Jika kita menganggap Pemilu sebagai pengukur yang sah, kita melihat penurunan dramatis suara partai partai Islam. Pada pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955, partai partai Islam mendapatkan jumlah suara cukup besar, yakni, 43%. Namun, pada dua pemilihan umum setelah Reformasi, semua partai politik Islam digabung hanya memperoleh tidak lebih dari 14% (pada 1999) dan 17% (pada 2004). Yang terpenting, agenda agenda Islam seperti Piagam Jakarta, yang menyiratkan penerapan syariat di tingkat negara, ditolak mentah mentah.¹³

¹²David E Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Yogyakarta: Yayasan Solidaritas Gajah Mada Yasogama, 1985), h. 167

¹³ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), h. 3.

Sebagian besar karya penting tentang hubungan antara Islam dan politik atau Islam dan negara memakai pendekatan tipologis untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan sikap kaum Muslim Indonesia dalam menghadapi isu-isu religius-politik. Hal ini disebabkan terutama oleh fakta bahwa Islam Indonesia adalah campuran bermacam ragam kelompok dan tidak bisa digambarkan dalam satu generalisasi¹⁴.

Kampus merupakan salah satu tempat di mana gerakan Islam radikal tumbuh di Indonesia, dan makin hari makin pesat perkembangannya. Sejumlah pentolan gerakan terorisme di Tanah Air merupakan alumni perguruan tinggi dalam negeri, yang kemungkinan besar terpengaruh paham Islam radikal sejak di dalam kampus melalui organisasi pengajian di kampus. Kampus Bahrum Naim, pentolan organisasi Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS), yang merupakan lulusan PTN adalah contohnya. Pada Februari 2014, sekelompok orang mendeklarasi dukungan terhadap ISIS di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penganut paham Islam radikal merupakan pendukung utama gerakan terorisme. Mereka menjadi teroris, apalagi yang melancarkan serangan bunuh diri, sudah pasti terpapar paham radikal. Paham radikal ini disebut pula sebagai “neo khawarij”. Khawarij di masa lampau adalah kelompok sempalan Islam yang gemar melakukan pengkafiran (takfir) serta menghalalkan pembunuhan terhadap pihak yang berbeda paham dengan mereka¹⁵.

Kita bisa mudah melihat proses doktrinasi dengan paparan radikalisme pada wajah milenial di Indonesia, dimana terjadi sebuah doktrin politik secara massif yang mempengaruhi fikiran-fikiran kemahasiswaan dan kemudian menggejala dalam lingkungan pemuda secara holistik. Sikap-sikap seperti ini kemudian menjadi warisan yang berkembang dengan pesat.

Setingkat di bawah kelompok radikal (neo khawarij) adalah kelompok fundamentalis. Kata “fundamentalisme” itu sendiri memiliki sejumlah pemaknaan. Fundamentalisme yang dimaksud mengacu pada pemahaman tekstualis yang kaku. Menurut Rocky Sistarwanto, setidaknya ada enam karakteristik sikap Islam fundamentalis, yakni:

¹⁴ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, h. 3

¹⁵ Alto makmuralto, *Lembaga Dakwah Kampus Ke Indonesiaan*, (Makassar; UKM LKIMB UNM Bekerjasama Liblitera Institute, 2016), h. 36.

(1) Sikap tidak toleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; (2) Sikap fanatic, ialah selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah; (3) Sikap eksklusif, yakni membedakan diri sendiri dari masyarakat lainnya; (4) Sikap revolusioner, ialah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan tujuannya; (5) Sikap memahami teks ajarannya secara tekstual dan parsial; (6) Sikap mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai universal¹⁶. Kaum fundamentalis senantiasa menyeru untuk kembali kepada model Islam versi masa silam. Isu-isu yang kerap mereka gaungkan di antaranya soal negara Islam (dalam versi mereka), dan sebagainya. Kelompok fundamentalis sangat rentan terpapar paham (ideology) radikal. Teroris adalah satu tingkat di atas radikal. Menurut Nafi' Muthohirin, "pandangan dan ideology Islam fundamentalis meski tidak bisa dilekatkan pada berbagai aksi terorisme sebagaimana yang ditampilkan kelompok ekstrimis Islam, namun ideology ingin memformalisasikan Islam sangat berdekatan dengan bangunan ideology gerakan ekstrimis"¹⁷.

Warisan radikalisme seperti ini kemudian membuat sendiri tradisi-tradisi di kalangan kelompoknya sehingga mudah teridentifikasi saat berdiskusi, kegiatan seminar maupun penolakan terhadap ajaran dan materi keilmuan di kelas. Karena sikap yang mencolok dan sikap yang cenderung berbeda dengan garis ideology masyarakat pada umumnya yang menganut ideology Pancasila.

(De) Konstruksi Sosial Politik

Sejak jatuhnya Soeharto di tahun 1998, terjadi perkembangan di Indonesia yang banyak mengubah citra Islam Indonesia dan anggapan tentang Muslim Indonesia yang selama ini dikenal toleran dan cenderung mau berkompromi. Di masa jaya Orde Baru, tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, Islam Indonesia telah menunjukkan wajah yang tersenyum mungkin sudah selayaknya begitu, karena dipimpin oleh penguasa otoriter yang dikenal sebagai "the smiling general". Yang menonjol adalah wacana yang modernis dan mendukung program-program pembangunan pemerintah, yang merangkul ideology negara

¹⁶ Alto makmuralto, *Lembaga Dakwah Kampus Ke Indonesiaan*, h. 37

¹⁷ Alto makmuralto, *Lembaga Dakwah Kampus Ke Indonesiaan*, h. 38

Pancasila yang sebenarnya sekuler, mendukung keselarasan hubungan (dan kesamaan hak) dengan non-Muslim yang minoritas, dan menganggap ide negara Islam tidak cocok untuk Indonesia. Beberapa tokoh pentingnya menjagokan “Islam kultural” sebagai alternatif dari Islam politis dan menekankan bahwa kultur Muslim Indonesia sama saja sahnya dengan aneka rupa Islam di Timur Tengah¹⁸.

Seperti senyum Soeharto, wajah ramah para penyambung lidah Muslim terkemuka menyembunyikan beberapa kenyataan yang tidak mengenakkan, seperti terutama pembunuhan massal terhadap tertuduh komunis di tahun 1965–1966, yang telah direayasa pasukan militer yang diutus oleh Soeharto tetapi sebagian besar dilakukan oleh pasukan pembunuh yang direkrut dari organisasi Muslim besar. Ada juga pemikiran dan gerakan Islam yang terpendam dan lebih fundamentalis, dan ada ketakutan yang luas di kalangan Muslim yang tidak sepenuhnya tidak berdasar tentang usaha orang Kristen untuk melemahkan Islam. Namun, yang paling menonjol adalah wacana yang liberal, toleran, dan terbuka seperti yang kita jumpai pada Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Wacana seperti ini mendapat liputan luas di pers dan terlihat pengaruhnya di kampus kampus, Departemen Agama dan organisasi organisasi Muslim yang besar, dan juga kalangan kelas menengah yang sedang muncul¹⁹.

Era pasca-Soeharto menawarkan wajah Islam Indonesia yang amat berbeda. Selama beberapa tahun, terjadi konflik antaragama di berbagai wilayah. Gerakan jihad (didukung oleh faksi militer dan kelompok kepentingan di daerah) membawa panji panji Islam ke konflik konflik di daerah, mengubahnya menjadi medan perang untuk sebuah perjuangan yang tampaknya akan memecah belah bangsa²⁰.

Wajah keindonesiaan kita sampai hari ini menjadi wajah yang beridentitas, beraliran sampai pada dikotomi kelompok, dikarenakan kepentingan politik yang berbalut agama yang akan mengancam disintegrasi kebangsaan. Banjirnya informasi media yang tidak beretika dan memuat banyak informasi yang tidak berdasarkan fakta dan data. Ditambah

¹⁸Martin Van Bruinessen, *Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan Conservative Turn*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2014), h 24.

¹⁹Martin Van Bruinessen, *Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan Conservative Turn*, h. 24

²⁰Martin Van Bruinessen, *Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan Conservative Turn*, h. 24

kepujian teknologi informasi yang senantiasa seseorang bisa merekrut informasi dari sumber yang tak terpercaya dan mudahnya dibagikan dan diteruskan kepada orang lain yang mempunyai sosial media sebagai pembentuk opini publik dan isu politik terkini, tidak dengan kebenaran yang menyatu akan tetapi berdasarkan emosi seseorang dapat terpengaruh dan percaya akan informasi yang mereka baca dan dengar.

System politik kita dipengaruhi oleh sekelompok ormas yang telah menguasai institusi dengan suara suara jalanan yang sangat massif dan bergelombang. Disatu sisi negara tidak boleh kalah dengan kelompok ormas tersebut disatu sisi negara tidak boleh mengintervensi fisik kelompok ormas yang telah berpengaruh terhadap jalannya system politik di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran publik mengingat ideology kelompok ormas tersebut yang telah terselubung kepentingan politik dan agama sehingga mengkonter isu isu yang beredar sangat sulit karena pelaku penyebar informasi di sosial media adalah mereka mereka yang terpapar doktrin bahwa islam telah melawan kelompok kafir, pemerintahan yang anti islam, rezim yang anti ulama bahkan tuduhan rezim adalah komunis. Sehingga mengakibatkan publik merasa ingin membela agamanya, membela ulamanya dengan secara tidak langsung. Padahal kita ketahui sampai sekarang Indonesia masih dipimpin oleh seorang Presiden yang sejak dari dulu beragama Islam dan Susunan kabinetnya pun boleh dikata 90% beragama islam.

Ada semacam ketakutan sejarah sehingga konstruksi politik kita sengaja dibuat suasana konflik antara individu yang berbeda kepentingan politik, berbeda pilihan politik sampai berbeda pilihan calon pemimpin. Tak juga bisa dipungkiri media ikut ikut mempengaruhi nalar utama publik dengan mempertontonkan isu, propaganda anti pemerintahan disatu sisi dan media yang pro pemerintah disatu sisi. Sebenarnya tidak masalah media bekerja, namun akhir akhir ini isu dan opini politik mengarah kepada terbentunya negara dengan masyarakat dalam arti luas, terbentunya individu dan individu dalam arti sempit. Tatkala partai politik pun juga saling terbentur ketika berada di jalan oposisi pun berada di jalan koalisi atau garis pemerintahan.

Katakanlah konstruksi sosial politik keindonesiaan kita sangat dipengaruhi oleh representasi elit, pada jama Soekarno beliau berbenturan banyak kelompok pemberontakan

sampai dengan berbentur dengan partai yang dianggap berseberangan dengan Pancasila katakanlah Partai Masyumi yang diketuai oleh sahabatnya sendiri yaitu Prof Kasman Singodimejo dimana beliau juga salah satu Panitia Pembentukan Kemerdekaan Indonesia yang dimana Prof Kasman Singodimedjo ditunjuk langsung oleh Soekarno bersama enam anggota lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, Sayuti Malik dan lainnya. Akan tetapi pada tahun 1963 Prof Kasman Singodimedjo ditangkap dan ditahan karena dianggap Partai Masyumi yang dimana beliau termasuk salah satu pimpinan dianggap melanggar pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan dan perserikatan yang bermaksud melakukan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Saat itu ditengarai pemberontakan PRRI/Permesta diduga didukung oleh partai Masyumi.

Tidak lupa pula antara konflik elit partai di jaman Presiden Soeharto, yang paling kita ketahui adalah agenda lima tahunan Soeharto yang dilaksanakan dengan format pemilihan umum memilih Presiden dan wakil presiden dan juga memilih wakil rakyat melalui tiga partai diantaranya Golkar (Golongan Karya), PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai partai yang mewakili umat Islam, dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) sebagai partai yang mewakili ideology nasionalisme demokrat. Akan tetapi wakil rakyat tetap dipilih oleh Soeharto yang telah ditunjuk oleh orang-orang Soeharto saat itu. Konflik antar elite sangat terlihat pada konflik partai dikarenakan semua unsure negara terlebih PNS harus memilih Golkar sebagai pilihan partainya, jika ada indikasi kuat seorang PNS memilih selain Golkar maka bisa dipastikan kedudukan dalam PNS bisa hilang atau terganti. Praktik politik yang sangat buruk di jaman Soeharto adalah kewajiban PNS mencoblos Golkar yang saat itu Golkar bukanlah Partai namun sebuah Golongan. Terkesan politik basa basi yang hasil lima tahunan selalu sama pemenangnya. Golkar peraih suara terbanyak sepanjang orde baru berkuasa, 32 Tahun lamanya.

Ditahun pasca reformasi konflik yang paling berpengaruh adalah pada Pilpres 2014, dimana pertarungan Prabowo dari Partai Gerindra melawan Jokowi dari Partai PDIP. Saat itu partai Prabowo disebut dengan Koalisi Permanen dengan mengantongi Partai Besar seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, Pan, PKS, PPP dan PBB. Dan Koalisi Jokowi disebut dengan Koalisi Indonesia Hebat atau disingkat KIH, diantaranya Partai PDIP sebagai partai

pengusung, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI yang cenderung dianggap sebagai koalisi kecil. Dimasa inilah penggunaan teknologi sosial media untuk kepentingan politik menjadi terintegrasi kepada publik luas Indonesia, era dimana informasi membanjiri publik. Era dimana Hoaks masuk diranah publik, mulai kalangan professional sampai akademisi tak luput dari pemberitaan hoaks, mulai dari portal agama sampai portal nasionalis terlibat dalam pemberitaan hoaks yang disengaja ataupun yang terkonsolidasi seperti media Obor Rakyat, Muslim Cyber Army (MCA), Saracen yang telah mendapatkan laporan pada pihak berwajib.

Ada dua pilihan yang harus diambil oleh negara, yaitu mencengkeram sekuat kuatnya kebebasan media dan mengatur perkembangan penggunaan teknologi di kalangan warga negara, seperti RRC-Beijing, atau melepaskan sama sekali perkembangan teknologi di kalangan warga negara, agar masyarakat belajar sendiri terhadap literasi media²¹.

Kedua cara itu sama sama mengandung resiko. Pertama pengalaman negara negara yang menerapkan kebijakan represif terhadap media, contohnya RRC-Beijing, menyebabkan masyarakat menjadi terpenjara di dalam dominasi kekuasaan rezim. Walaupun kemajuan ekonomi dapat diciptakan oleh negara, namun warga negara merasa kebebasan selalu dibayangi oleh pemerintah, sedangkan negara secara ketat mengontrol warga negaranya. Kedua membebaskan warga negara menggunakan teknologi (media) menyebabkan masyarakat berkembang bersama berbagai aspek komunikasi (media), negara semakin sulit mengontrol masyarakat dan media menjadi alat kapitalis yang senantiasa mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat²².

Derrida dikenal sebagai salah satu tokoh dekonstruksi sosial, pemikiran pemikirannya mengilhami semua tindakan sosial orang orang untuk melakukan kritik terhadap konstruksi sosial. Bahwa sesungguhnya konstruksi sosial itu adalah buatan manusia dengan berbagai kepentingan dari sang pembuat konstruksi sosial. Karena itu sesungguhnya konstruksi sosial ini adalah pedang bermata dua. Apabila digunakan untuk

²¹Burhan bungin, KOMunikasi Politik Pencitraan, The Sosial Construction of Publik Administration (SCoPA), (Jakarta; Prenadamedia Grup, 2018), h. 151.

²²Burhan bungin, Komunikasi Politik Pencitraan, The Sosial Construction of Publik Administration, h. 151

sebuah kebaikan, maka konstruksi sosial akan bermanfaat bagi masyarakat, namun apabila konstruksi sosial digunakan untuk sebuah tindakan menyerang orang atau kelompok tertentu, maka konstruksi sosial menjadi alat yang mematikan. Konstruksi sosial yang digunakan oleh para pemuka agama untuk membangun pengetahuan tentang ajaran ajaran mengenai pahala, dosa, akhlak, neraka, surka dan sebagainya merupakan sisi kebaikan konstruksi sosial. Dalam masyarakat ini ada begitu banyak kebaikan konstruksi sosial di dalam membangun norma kehidupan sosial seperti norma keluarga, norma akhlak, norma berniaga, pendidikan dan sebagainya bahkan norma (aturan) berperang merupakan kebaikan konstruksi sosial. Bahkan, tidak ada kehidupan sosial yang baik baik tanpa konstruksi sosial, semua kehidupan sosial di bangun melalui konstruksi sosial²³.

Dekonstruksi derrida menggambarkan teks sebagai perubahan untuk makna makna baru. Teks yang dikonstruksi oleh seseorang dapat dikembangkan menjadi sebuah penggambaran yang memuat kepentingan seseorang terhadap maksud tertentu, tujuannya tergantung dampak yang ditimbulkan apakah bermaksud kontradiktif bahkan sampai pada wilayah perdebatan untuk mempengaruhi wilayah publik tertentu yang sampai pada kondisi social yang diharapkan oleh seseorang ataupun komunitas tertentu.

Dekonstruksi tersebut lebih banyak digunakan pada wilayah politik jika berkaitan dengan kontestasi politik tertentu. Sehingga melahirkan paham tertentu seperti *post truth* dimana seseorang menciptakan teks tertentu berdasarkan emosi penulis, hasrat penulis yang membuat konteksnya akan mencari emosi yang sama oleh para pembacanya. Para pembaca yang membaca teks tersebut tidak lagi melihat unsure kebenaran yang lahir dari sebuah teks, akan tetapi jika pembaca sudah merasa hasrat dan emosinya sudah mewakili bacaannya maka pembaca merasakan itu adalah sebuah kebenaran, dan menjadi mengkhawatirkan tatkala hasrat dan emosi lebih menguasai alur social media daripada kebenaran itu sendiri.

Alvin tofler dalam buku pergeseran kekuasaan berkata bahwa politik itu menyangkut kekuasaan, bukan kebenaran. Keputusan berdasarkan pada temuan temuan

²³Burhan bungin, Komunikasi Politik Pencitraan, The Sosial Construction of Publik Administration, h. 151

“objektif” atau pemahaman yang mendalam, melainkan pada konflik kekuatan, yang masing masing mengejar kepentingannya sendiri. Menurutnya strategi yang dimaksud adalah meta taktik, seseorang yang kemudian tampak berusaha menggeser perimbangan kekuasaan politik dengan mendepak data keuangan negara yang terkomputerisasi. Semua perimbangan kekuasaan politik menurutnya berada pada microchips untuk mengetahui data data pemerintahan sebagai akses terhadap dokumen publik yang menjadi objek penyelenggaraan negara. Yang menguasai meta taktik adalah meraka yang menguasai seluruh perimbangan politik dan kekuasaan dan menguasai ranah konflik dalam kekuasaan. Jika ditangan yang baik bisa berguna bagi publik, akan tetapi jika ditangan yang tidak baik bisa berdampak pada bocornya rahasia negara dan pengkodifikasian data dokumen negara dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E., 1985, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta : Rajawali ; Yogyakarta : Yayasan Solidaritas Gadjah Mada (Yasogama).
- Assyaukanie, Luthfi, 2011, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Freedom Institute.
- Bungin, Burhan, 2018, *Komunikasi POLitik Pencitraan The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*, Jakarta, PrenadaMedia Grup
- Bruinessen van Martin, 2014, *Conservative Turn Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung, PT Mizan Publika.
- Corporazo, James A., dan David P. Levine, 2015, *Teori Teori Ekonomi Politik*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Jurdi, Syarifuddin, 2016, *Negara dan Kekuasaan Pemikiran Politik Ali Syariati*, Yogyakarta, PT Gramasurya dan Labpol UINAM.
- Makmuralto, Alto, 2016, *Lembaga Dakwah Kampus Keindonesiaan*, Makassar : Liblitera Institute.
- Mallarangeng, Rizal. 2008, *Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Tovler, Alvin, 1992, *Pergeseran Kekuasaan, Pengetahuan, Kekayaan, dan kekerasan di penghujung Abad 21*, PT. Pantja Simpati.